

**PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK  
HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung  
Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**M. Surya Rahmadi**

**NPM: 1521020230**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021 M**

**PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK  
HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung  
Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**M. Surya Rahmadi**

**NPM: 1521020230**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya yang berkedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipilih masyarakat desa. Begitupun yang terjadi di desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Islam sendiri tidak mengatur sistem politik secara spesifik, akan tetapi secara umum ajaran Islam di dalam Al-Quran dan Hadits mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni: bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kota Dalam dan bagaimana pandangan politik hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam. Skripsi ini bertujuan: untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kota Dalam dan untuk mengetahui pandangan politik hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam.

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian jenis lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan. Adapun dari sifat penelitiannya, penelitian ini adalah (*deskriptif analitis*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai sesuatu yang menjadi pendekatan objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum, untuk di dapatkan dan di tarik menjadi kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang dibentuk BPD, yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam belumlah berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, yaitu adanya pelanggaran yang berupa pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti halnya praktik politik uang, tidak tegasnya panitia pengawas dan tindakan-tindakan pelanggaran lainnya. Adapun dalam pandangan politik hukum Islam (*siyasah*) terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kota Dalam dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi masih banyak hal-hal penting untuk dikoreksi lebih lanjut seperti kriteria dalam memilih pemimpin dan tindakan-tindakan yang kurang sportif dari para calon kepala desa.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Surya Rahmadi  
NPM : 1521020230  
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Mei 2021  
Penulis,

M. Surya Rahmadi  
NPM. 1521020230





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)**  
Nama : M. Surya Rahmadi  
NPM : 1521020141  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
NIP. 195512251985031002

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 197409202003121003

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003512200901101





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)** Oleh: **M. Surya Rahmadi, NPM. 1521020230, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021:

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشَرَّارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.

(رواه البخاري)

*Dari 'Auf Ibn Malik, berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. 'Auf berkata: Kami berkata: Ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak kepada mereka? Beliau saw. bersabda: Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat di tengah kalian.*

(HR. Bukhari)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Quro, 2011), 630.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Surni Abdurrahman dan Ibunda Bertilia Fatoni tercinta terima kasih yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, kepada Kakakku Nur Handayani dan Adikku Ahmad Zakaria yang selalu hadir untuk memberiku motivasi, Rekan-rekan seangkatan (Siyasah 2015) dan sahabat-sahabatku khususnya Siyasah A terima kasih untuk kebersamaan selama ini, Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya sehingga bisa menyelesaikan studi ini dan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.



## **RIWAYAT HIDUP**

M. Surya Rahmadi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 1996, Anak kedua dari pasangan Surni Abdurrahman dan Bertilia Fatoni. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sidorejo selesai tahun 2008, di tingkat sekolah menengah dan atas dilanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam GONTOR Lampung Selatan selesai tahun 2014, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Mei 2021  
Penulis,

M. Surya Rahmadi  
NPM. 1521020230

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. H. Dr. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah khususnya Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan, dan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 04 Mei 2021  
Penulis,

M. Surya Rahmadi  
NPM. 1521020230



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
 <b>BAB II: KAJIAN TEORI</b>	
A. Politik Hukum Islam .....	18
1. Pengertian Politik Hukum Islam .....	18
2. Ruang Lingkup Politik Hukum Islam .....	26
3. Fungsi dan Tujuan Politik Hukum Islam .....	29
B. Pemilihan Pemimpin Dalam Islam .....	32
1. Pengertian Pemilihan Pemimpin.....	32
2. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin.....	35
3. Kriteria Memilih Pemimpin .....	38
4. Sistem Pemilihan Pemimpin .....	42
5. Tujuan Pemilihan Dalam Islam.....	44
 <b>BAB III: OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	45

B. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam .....	51
C. Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam.....	54

#### **BAB IV: ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam .....	68
B. Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam .....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA.....**

#### **LAMPIRAN.....**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. : Nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa.....	46
3.2. : Data Kepala Desa dan Perangkat Desa.....	47
3.3. : Tata Guna Tanah Desa Kota Dalam.....	48
3.4. : Jumlah Penduduk Desa Kota Dalam.. ..	49
3.5. : Mata Pencarian Penduduk Desa Kota Dalam.....	49
3.6. : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kota Dalam. ....	50
3.7. : Sarana dan Prasarana Desa Kota Dalam.....	50
4.1. : Data Pemilih Desa Kota Dalam.....	70



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

**Pemilihan,** adalah cara atau metode yang diatur untuk melakukan suatu pemilihan atau proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggotanya masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memilih. Bertujuan untuk memegang jabatan administratif publik yang sekaligus mewujudkan suatu pemerintahan yang berdemokrasi.<sup>1</sup>

**Kepala Desa,** kepala desa adalah yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>2</sup>

**Politik Hukum Islam,** adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang Hukum Islam yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>3</sup> Abdul Al-Wahhab Khallaf mendefinisikan Politik Hukum Islam sebagai suatu terma dan terjemahan dari siyasah asy-

---

<sup>1</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* Cetakan kedua (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 64.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 Nomor 84 Pasal 6 Ayat 1

<sup>3</sup> <https://www.slideshare.net/aditurki/politik-hukumislamdiindonesia>, Diakses 18-12-2019

syar'iyah yang secara terminologi diartikan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan yang menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas syar'iyah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid.<sup>4</sup>

**Kepala Desa**, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis bermaksud mengambil sebuah judul ini bahwa penulis berupaya untuk melihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi.<sup>6</sup> Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk

---

<sup>4</sup> Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 78.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang Deso Kelurahan dan Kecamatan* (Bandung : Fokus Media, 2014), h. 2.

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 50.

menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala Desa pemerintahan demokratis. Pemerintahan Desa selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala Desa yang masih dianggap sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di Desa karena calon pemimpin Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa setempat.

Desa atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala Desa, kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa.

Kedudukan kepala Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan Desa.<sup>7</sup> Kepala Desa dalam urusan pemerintahannya dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga Desa yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat Desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa kepada pemerintahan Desa termasuk membentuk panitia pemilihan kepala Desa jika

---

<sup>7</sup> Koswara Kartapradja, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat* (Jakarta : PT. Candi Cipta Paramuda, 2002), h. 302.



masa pemerintahan kepala Desa sudah berakhir. Desa di berbagai daerah di Indonesia terdapat banyak sebutan nama lain seperti Kepala Kampung, Desa, Tiyuh dan Peratin.

Pengangkatan Kepala Desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Namun dalam praktiknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena adanya faktor- faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimasi. Selain itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa sehingga sering kali kebudayaan sangat berperan di dalamnya.

Seiring dengan hal ini dalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades. Yang diwarnai dengan kericuhan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi seperti ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah Desa yang terdapat di Tanah air Indonesia.

Seperti contohnya di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menemukan beberapa permasalahan

terkait pelaksanaan pemilihan kepala Desa Kota Dalam yang diwarnai suatu konflik dan kericuhan, hal ini didapatkan oleh penulis dari beberapa bukti wawancara penulis kepada beberapa masyarakat yang tinggal atau menetap di Desa Kota Dalam. Jadi di dalam Proses pelaksanaan pilkades di yang diwarnai suatu persoalan-persoalan yang pada akhirnya menuai konflik dan kericuhan, maka penulis merasa perlu untuk meneliti suatu sistem pemilihan yang ada di Desa Kota Dalam, untuk memahami dan dapat menyimpulkan apa saja persoalan-persoalan yang menimbulkan kericuhan dan konflik dalam pemilihan kepala Desa Kota Dalam.

Desa Kota Dalam terletak di Kabupaten Lampung Selatan dikenal masih sangat homogen yang mana hanya terdapat adat Lampung dan didominasi oleh Agama Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik. Sehingga masyarakat lupa diri akan pentingnya kekeluargaan dan kebudayaan demi kepentingan politik yaitu memenangkan calon mereka masing-masing dan berusaha untuk mengalahkan calon yang lain sebagai lawan politiknya.

Pemilihan kepala Desa sama artinya dengan pemilihan yang akan menduduki pemerintahan di Desa tersebut. Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena kita bisa bayangkan bagaimana jadinya jika dalam suatu Negara tidak ada pemimpin yang mengatur jalanya kehidupan di Negara.

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadits juga mengajarkan

seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu di mana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab di urusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab di akhirat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang pandangan Islam terhadap pemilihan kepala Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan tersebut dan implikasinya bagi masyarakat setelah pemilihan kepala Desa.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini pada dasarnya berpusat pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan masa jabatan periode 2015-2021.

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka beberapa sub bagian yang akan kembali menjadi fokus dari penelitian ini yaitu mengenai tata cara pemilihan kepala desa di desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Tata cara tersebut terdiri atas pendaftaran, pencalonan, dan pemilihan kepala desa hingga mengenai masalah kampanye dan hak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi yang dimaksud adalah meliputi partisipasi dalam keikutsertaan dalam kepanitiaan kepala desa, pemberian suara, dan partisipasi warga yang

dengan tanpa paksaan berupaya ikut serta mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Kemudian yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai pandangan pemilihan kepala desa Kota Dalam dalam perspektif politik hukum Islam tentang persoalan yang timbul dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Persoalan ini terkait hambatan-hambatan mengenai adakah kerusuhan warga masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan juga masalah-masalah lainnya yang dilakukan oleh beberapa calon kepala desa apabila ditinjau dari sudut pandang politik hukum Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala desa Kota Dalam?
2. Bagaimana pandangan politik hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kota Dalam.
2. Untuk mengetahui pandangan politik hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah suatu hal-hal yang berisikan permasalahan penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman yang kemudian diklasifikasikan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis, adapun kegunaan dalam skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait permasalahan dalam skripsi ini.
2. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan pemilihan kepala Desa Kota Dalam yang tidak menyalahi posisinya dalam Islam.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Sebuah jurnal karya Muhammad Yunus dengan judul “Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa

Serentak” jurnal ini menerangkan tentang partisipasi dan perilaku masyarakat dalam menanggapi pemilihan Kepala Desa Serentak.<sup>8</sup>

2. Skripsi dengan judul, “Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan Dalam Islam (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Skripsi ini berbicara tentang bagaimana proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem pemilihan Kepala Desa Way Jambu Labuhan Krui berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak-hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan atau pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Sebagaimana sesuai dengan amanat Undang-undang 1945 tentang desa dan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan akan dibagi pula dalam daerah yang kecil dan wilayah administratif. Penelitian dalam skripsi ini juga menguraikan suatu persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak manusia untuk memilih secara jujur dan adil. Dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Yunus “Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak” *Jurnal AKP, Volume 8, Nomor 2* (Agustus 2018).



menggunakan suatu metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan dengan sumber data wawancara terhadap warga desa Way Jambu Labuan Krui melalui metode sampel.<sup>9</sup>

3. Skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015”. Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa Triwulan. Kemudian skripsi ini juga memaparkan pelanggaran-pelanggaran yang tengah terjadi di dalam proses pemilihan kepala desa di desa Triwulan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan situasi dan kejadian secara kongkret. Guna menggali peristiwa dan kejadian pemilihan kepala desa yang tengah terjadi di desa Triwulan yang berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa.<sup>10</sup>

Sementara itu skripsi yang akan dibuat oleh penulis dalam skripsi ini akan membahas masalah tentang sistem pemilihan kepala desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan

---

<sup>9</sup> Pikri Rohman, skripsi “Sistem Pemilihan Kepala Desa (Peratin) Perspektif Ketatanegaraan Dalam Islam (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Lampung: Bandar Lampung, 2017).

<sup>10</sup> Taufiq Gunawan Skripsi “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015”, (Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2009).

metode wawancara terhadap warga desa Kota Dalam untuk mengambil sampel yang kemudian di olah menjadi suatu bahasan dalam skripsi ini, dengan melalui izin terhadap pihak-pihak desa. Wawancara yang diambil dari responden dengan macam-macam latar belakang baik aparatur desa, panitia pemilihan, tokoh masyarakat dan warga desa.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.

### 1. Jenis dan Sifat

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>11</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya..

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.<sup>12</sup> Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi

---

<sup>11</sup> Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research* (Jakarta : Sumbangsi, 1975), h. 2.

<sup>12</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

jelas dan terang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.<sup>13</sup> Penulis akan menganalisis tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam, dalam Perspektif politik Hukum Islam (Studi kasus di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan).

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang di teliti.<sup>14</sup> Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah masyarakat Desa Kota Dalam yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala Desa yang berjumlah 875 orang.<sup>15</sup>

Sampel adalah contoh, refresentasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.<sup>16</sup> Tujuan penelitian mengambil sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive Sampling* juga disebut *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 66.

<sup>14</sup> Sed Ermayati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* Cet. I (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 121.

<sup>15</sup> Monografi, Deso Kota Dalam Tahun 2015.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 148.

persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar tidak sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang pantas dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa/Calon Kepala Desa : 3 Orang
- b. Panitia Pemilihan : 6 Orang
- c. Tokoh Masyarakat (Agama dan Adat) : 3 Orang
- d. Warga Desa : 10 Orang

### 3. Data Dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari Kepala Desa, Panitia Pemilihan tokoh masyarakat dan Warga Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum pemilihan kepala Desa secara umum dan Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini : Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Panitia Pemilihan

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses sistem pemilihan kepala Desa Kota Dalam di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

#### 5. Analisa Data

Data yang dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.102.

berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif.

a. Metode Deduktif

Adalah metode analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kaidah yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan politik hukum Islam tentang sistem pemilihan Kepala Desa Kota Dalam di desa Kota Dalam.

b. Metode induktif

Adalah analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang bersifat khusus menuju suatu kaidah yang bersifat umum. Artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada dalam Undang-undang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis sistem pemilihan Kepala Desa Kota Dalam menurut perspektif politik hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu, Bagian awal atau yang disebut sebagai pendahuluan skripsi secara berturut-turut berisi, cover skripsi, halaman sampul, abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan,



kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Bagian kedua adalah substansi (inti), pada bagian ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam penulisan skripsi terdiri atas, bab-bab dan sub bab. Bagian ketiga dalam skripsi ini berisikan, pertanggungjawaban dan bukti-bukti teoretis yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran. Untuk bagian kedua yang berisikan tentang substansi (Inti) penulis mendeskripsi skripsi ini dengan memaparkan bagian-bagian dari bab skripsi ini, diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan : Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori : Dalam bab II ini diuraikan teori-teori tentang, Pengertian Politik Hukum Islam, Ruang Lingkup Politik Hukum Islam, Manfaat dan Tujuan Politik Hukum Islam, dan Pengertian Pemilihan Pemilihan Pemimpin, Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin, Kriteria Memilih Pemimpin, Sistem Pemilihan Pemimpin, Tujuan Pemilihan Dalam Islam.
3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian yaitu, Gambaran Lokasi Penelitian, Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam, Pemilihan Kepala Desa Kota Dalam.
4. BAB IV Analisis Penelitian : Di dalam bab ini di uraikan hasil analisis penulis yaitu, Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kota Dalam dan

Pandangan politik hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

5. BAB V Penutup : Di dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian dengan menguraikan simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan objek masalah yang ada.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Politik Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Politik Hukum Islam**

Istilah politik hukum Islam merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kata yang sebenarnya ada dalam ilmu pengetahuan Islam dengan bahasa Arab, yang berasal dari dua kata yakni, *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk masdar dari tasyrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*Fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci<sup>18</sup>.

Adapun politik (*al-Siyasah*) berasal dari kata yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*.

Definisi lain ialah Ibnu Qayyim dalam Ibnu 'Aqil menyatakan: "*Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan,*

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2010), 18.

*sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya”*.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, politik hukum Islam atau *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>20</sup>

Objek kajian politik hukum Islam meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan<sup>21</sup>. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasby Ash Shaddieqy: “*Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian*

---

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

<sup>20</sup> *Ibid*, 30.

<sup>21</sup> *Ibid*, 33.

*penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang akhusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap’.*<sup>22</sup>

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: *“Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.*<sup>23</sup>

Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.<sup>24</sup>

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan *idiil* dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Darul Al-Fikr, 2010), 25.

<sup>23</sup> J. Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), 45.

<sup>24</sup> *Ibid.* 47.

<sup>25</sup> *Ibid.* 48.

Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh* lain, dalam *Fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul Fiqh* dan *qowaid Fiqh*. Kemudian dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syari'at al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>26</sup> Secara umum, dalam *Fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti:

a. *Qiyas*

*Qiyas* (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.<sup>27</sup> Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun *Qiyas*, yaitu:

---

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 17.



- 1) Dasar (dalil)
- 2) Masalah yang akan diqiyaskan
- 3) Hukum yang terdapat pada dalil
- 4) Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

Penggunaan *Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya<sup>28</sup>.

b. *Maslahah Mursalah*.

*Maslahah* secara harfiah berarti manfaat dan *mursalah* berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, *Maslahah Mursalah* dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada teks khusus (teks al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, *Maslahah Mursalah* adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung.

Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu

---

<sup>28</sup> Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

disebut *masalah mulgah* (batal). Sementara itu, *masalah muralah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.<sup>29</sup> *Qiyas* dalam *Fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Pada umumnya *Maslahah Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *Maslahah Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *Fiqh*, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *Maslahah Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan<sup>30</sup>.

#### c. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*

Secara harfiah, *Sadd al-Dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, *Sadd al-Dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad,

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: Darul Al-Fikr, 1986), 858.

<sup>30</sup> *Ibid*, 50

perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul Fiqh mendefinisikan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan.<sup>31</sup>

Sedangkan *Fath al-Dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun kewajiban (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Dalam *Fiqh siyashah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kerusakan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.<sup>32</sup>

d. *Al-'Adah*

*Al-'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), 457.

<sup>32</sup> *Ibid*, 51.

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh siyasah* adalah *al-'adah*. *Al-'Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-'addah al-fasidah*. *Al-'adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*<sup>33</sup>.

e. *Istihsan*

Secara harfiah, *Istihsan* berarti memandang baik dalam teori hukum Islam, *Istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau pengecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul Fiqh, *Istihsan* diartikan sebagai “*Meninggalkan suatu ketentuan hukum umum yang berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya dalil syara' untuk melakukan hal demikian*”.<sup>34</sup>

Seiring diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Maka dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang lain maka konsep ini adalah memilah dari kedua dalil tersebut yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

menurutnya lebih kuat. Sebagaimana Ibnu ‘Arabiy berpendapat:

*“melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil”*.<sup>35</sup>

f. Kaidah-Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

2. Ruang Lingkup Politik Hukum Islam

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Politik Hukum Islam adalah ilmu yang otonom walau sekalipun bagian dari ilmu Fiqh. Selanjutnya, Hasby Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu Fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian Politik Hukum Islam menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non-Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian Politik Hukum Islam. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan karangannya dalam bidang Politik Hukum Islam yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup Politik Hukum Islam atau *Fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibnu Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

---

<sup>37</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 34. Lihat juga, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>38</sup> Ibnu Tamiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyat, 1996), 4.



Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>39</sup> Dan Abdul Wahhab Khaliq mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashaddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syari'ah* aman yang tetap.<sup>41</sup> Dan Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tetangan penetapan hukum)

---

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-Anshor*, (Qahirat, 1977), 5.

<sup>40</sup> *Ibid.* 67.

<sup>41</sup> Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 2000), 28.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Menurut Sayuti Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagian yakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan Luar Negeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Peperangan)

### 3. Fungsi dan Tujuan Politik Hukum Islam

Fungsi dan Tujuan Politik Hukum Islam menurut para ulama berbeda-beda dalam memaparkan dan menjelaskan sesuai dengan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri, adapun dalam skripsi ini penulis memaparkan beberapa fungsi dan Tujuan Politik Hukum Islam sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Asas-Asas *Siyasah Syar'iyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban

---

<sup>43</sup> J. Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 4.

supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Dapat dikatakan bahwa dalam kajian Politik Hukum Islam terdapat rambu-rambu yang harus ditaati sebagai asas Politik Hukum Islam dalam menjalankan suatu proses bernegara, ada asas-asas yang harus di pegang yaitu sebagai berikut:

1) Asas legalitas

Bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum (ada peraturan tertulis yang melandasinya). Terlebih untuk negara hukum (Indonesia), sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.<sup>44</sup>

2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 5.

pemerintahan negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada:<sup>45</sup>

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan;
- b) Perencanaan data pembangunan;
- c) Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah;
- d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat;
- e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisis;
- f) Keadilan tata usaha/administrasi negara;
- g) Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

b. Demokrasi dalam politik Islam

Gagasan utama dari demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hampir setiap gerakan politik selalu mengatas namakan demokrasi sebagai hak asasi politik yang sakral dan luhur yang harus terus-menerus diagungkan dalam peraturan politik praktis. Demokrasi juga cerminan dari suatu proses budaya dalam menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Demokrasi sebaiknya bercirikan pada tujuh substansi di bawah ini:<sup>46</sup>

- 1) Prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*, 7.

- 2) Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang mengehendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara.
- 3) Cara haruslah sejalan dengan tujuan.
- 4) Bahwa suasana masyarakat demokrasi mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan.
- 5) Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang dan papan.
- 6) Adanya kerja sama dan saling percaya antar warga negara untuk saling mendukung secara fungsional.
- 7) Adanya pendidikan demokrasi yang sehat.

## **B. Pemilihan Pemimpin Dalam Islam**

### **1. Pengertian Pemilihan Pemimpin**

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem pemilihan dalam Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti pemilihan dalam Islam. Dalam Islam Pemilihan itu dapat diartikan dengan baiat. Jadi baiat adalah: pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antara rakyat dan penguasa

Baiat dalam Islam yang biasa kita kenal adalah *bai'at al-Aqabah* yang merupakan peristiwa sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Tiap ada terjadi peristiwa pengangkatan seorang pejabat terutama pejabat tertinggi (Khalifah) terjadi pula upacara baiat timbal balik,

baiatnya lembaga (orang-orang) yang mengangkat dan baiatnya orang yang di angkat. Adapun baiat itu menjadi salah satu syarat dari suatu pengangkatan.

Dalam Istilah Hukum Idlam, baiat mempunyai pengertian tersendiri, menurut para ulama bahwa Baiat ialah sebagai berikut: Sesungguhnya Baiat yaitu janji taat setia, seakan akan para pengangkat berjanji kepada amirnya bahwa mereka akan menyerahkan perhatian dan pembelaan kepada urusan Amir sendiri dan urusan kaum Muslimin, mereka tidak akan menentang Amir dalam urusan-urusan itu bahkan akan ditaatinya terhadap segala perintah, baik dalam senang ataupun susah.<sup>47</sup>

Inilah maksud baiat menurut ketentuan-ketentuan bahasa dan ketetapan syara', dan benarlah yang dimaksud dalam Hadits Nabi dengan baiat *al-Aqabah* yang berlangsung pada suatu malam di bawah sepohon kayu, dari mana berasal kata-kata baiat menurut istilah hukum

Sedangkan pengertian kepemimpinan atau pemimpin dalam konsep Islam baik kita melihat dari al-Qur'an, Hadits, Ijtihad dan sejarah-sejarah peradaban Islam. Maka di dalam konsep Islam kepemimpinan dapat diartikan dengan istilah khalifah, hal ini di dasarkan pada al-Qur'an sendiri sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30 berbunyi:

---

<sup>47</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, "Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), 75.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ  
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : 30)

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah [2]: 30)*

Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa penjelasan dari ayat di atas menjelaskan tentang kepemimpinan manusia di bumi. Kemudian setelah beberapa zaman dan periode pemahaman tentang kepemimpinan berkembang amat pesat dan menimbulkan beberapa perbedaan dalam penyebutannya menjadi imamah dan lain-lain. Al-Qur'an sebenarnya mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.

Pemimpin dalam pandangan al-Qur'an sebenarnya adalah pilihan Allah SWT, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kezaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Hal ini

telah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah manusia. Maka dapat dikatakan kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

## 2. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik, amal saleh dan perantara yang menyampaikan semua orang.

Islam sebagai sumber hukum dan politik umat Islam juga mengatur tentang kepemimpinan, hal ini didasarkan pada ketentuan yang di dapat dan bersumber dari al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu kedua sumber tersebut, merupakan sumber dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan acuan al-Quran dan al-Hadits. Sebagai berikut:

### a. Dalil Al-Qur'an

Sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : 29)

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan*



*membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 29)*

Kemudian Juga di dalam Q.S. an-Nur ayat 55 Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي  
الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي  
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا  
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  
(النور : 55)

Artinya : *Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nur[24]: 55)*

#### b. Dalil Al-Hadits

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a

عن ابن عمر قال رسول الله : أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  
رَعِيَّتِهِ فَأَلَامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ  
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ  
عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالٍ

سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>48</sup>  
(رواه البخارى)

Artinya : Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhori)

Kemudian Hadits yang diriwayatkan Abu Ja'la bin Jasar r.a

عن أبو جعالة بن جसार قال قال رسول الله : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ  
اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ  
الْجَنَّةَ (رواه البخارى) عَلَيْهِ

Artinya : tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. (HR. Bukhori)<sup>49</sup>

### 3. Kriteria Memilih Pemimpin

Apabila kita melihat dari segi al-Qur'an, dan al-Hadits terhadap perjalanan sirah Nabawiyah (sejarah perjalanan Nabi SAW) dan berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits, maka kita dapat menyimpulkan secara garis besar bahwa Islam bukan mengajarkan tentang bagaimana tata cara atau metode memilih pemimpin. Para ulama

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Quro, 2011), 835.

<sup>49</sup> *Ibid*, 836.

sepakat bahwa dalam hal ini yang berdasarkan kajian-kajian yang di dapat di dalam al-Qur'an dan Hadits hanya tentang kriteria dalam menentukan pemimpin dan bukan berbicara tentang sistemnya.

Beberapa faktor yang menjadi kriteria yang bersifat general dan spesifik dalam menentukan pemimpin tersebut adalah antara lain :

a. Faktor Keulamaan (Keshalihan)

Sebagaimana Allah SWT menerangkan di dalam Q.S. Fatir ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (فاطر : 28)

Artinya : *Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Fatir [35]: 28)*

Penjelasan dari ayat ini menunjukkan bahwa apabila pemimpin tersebut haruslah memiliki kriteria keulamaan, maka dia akan selalu menyandarkan segala sikap dan keputusannya berdasarkan wahyu (al-Qur'an). Dia takut untuk melakukan kesalahan dan berbuat maksiat kepada Allah. Ia tidak akan gegabah dan membantah atau mendahului ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengambilan keputusan, ia selalu merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan Al-Hadits.

b. Faktor Intelektual (Kecerdasan)

Seorang calon pemimpin haruslah memiliki kecerdasan, baik secara emosional (EQ), spiritual (SQ) maupun intelektual (IQ). Dalam

hadits Rasulullah melalui jalan shahabat Ibnu Abbas ra, Rasulullah bersabda :

عن ابن عباس قال رسول الله : الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا  
بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ<sup>50</sup>  
(رواه البخارى)

Artinya : “Orang yang pintar (*al-kayyis*) adalah orang yang mampu menguasai dirinya dan beramal untuk kepentingan sesudah mati, dan orang yang bodoh (*al-ajiz*) adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan pandai berangan-angan atas Allah dengan segala angan-angan”. (HR. Bukhari)

Hadits ini mengandung isyarat bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang mampu menguasai dirinya dan emosinya. Bersikap lembut, pemaaf, dan tidak mudah marah. Dalam mengambil sikap dan keputusan, ia lebih mengutamakan hujah al-Qur'an dan al-Hadits, daripada hanya sekedar nafsu dan keinginannya. Ia akan menganalisis semua aspek dan faktor yang mempengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan.

#### c. Faktor Kepeloporan

Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kepeloporan. Selalu menjadi barisan terdepan (pionir) dalam memerankan dan menjalankan perintah-perintah ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. az-Zumar ayat 12 Allah berfirman:

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (الزمر : 12)

Artinya : “Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri”. (Q.S. Az-Zumar []: 12)

---

<sup>50</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Quro, 2011), 839.

#### d. Faktor Keteladanan

Seorang calon pemimpin haruslah orang yang memiliki figur keteladanan dalam dirinya, baik dalam hal ibadah, akhlaq, dsb. Maka seorang pemimpin haruslah menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi dirinya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ahzab ayat 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب : 21)

Artinya : *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S. Al-Ahzab [33]: 21)*

Sehingga, meskipun tidak akan mencapai titik kesempurnaan, paling tidak ia mampu menampilkan akhlaq yang baik layaknya Rasulullah.

#### e. Faktor Manajerial

Seorang pemimpin haruslah memahami ilmu manajerial meskipun pada standar yang minimum. Memahami manajemen kepemimpinan, perencanaan, administrasi, distribusi keanggotaan, seorang pemimpin harus mampu menciptakan keserasian, keselarasan, dan kerapian manajerial lembaganya (*tandhim*), baik aturan-aturan yang bersifat mengikat, kemampuan anggota, pencapaian hasil, serta parameter-parameter lainnya. Dengan kemampuan ini, maka akan tercipta *tanasuq* (keteraturan), *tawazun* (keseimbangan), yang

keseluruhannya bermuara pada *takamul* (komprehensif) secara keseluruhan.

Oleh karena itu, mari kita lebih berhati-hati dalam menentukan imam atau pemimpin kita. Karena apa pun akibat yang dilakukannya, maka kita pun akan turut bertanggung jawab terhadapnya. Jika kepemimpinannya baik, maka kita akan merasakan nikmatnya. Sebaliknya, apabila kepemimpinannya buruk, maka kita pun akan merasakan kerusakan dan kehancurannya.

#### 4. Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam katagori teori politik Hukum Islam dianggap persoalan yang paling mendasar. Hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi seorang pemimpin. Bahkan menurut Al- Syah Rastani, pentingnya masalah pengangkatan pemimpin ini memicu timbulnya perpecahan dalam Islam terbagi beberapa golongan.

Sistem pengangkatan pemimpin dalam sejarah Islam, dapat dikategorikan ke dalam dua pola, yaitu: pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola pertama, pada saat ini dipegang oleh kaum syiah, sedangkan pola kedua, dianut oleh kelompok sunni. Menurut kelompok syiah, pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat, sementara menurut golongan

sunni, pengangkatan pemimpin itu harus berdasarkan kepada pemilihan umat atau yang lazim disebut syura. Alasannya adalah pertama, karena tidak adanya nash yang *qoth'i* tentang siapa pengganti setelah Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Kedua, karena prinsip kepemimpinan dalam Islam sudah di syariatkan, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Q.S. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى : 38)

Artinya : *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura [42]: 38)*

Bahwa dalam sejarah perkembangan Politik Hukum Islam para ulama membagi sistem pemilihan pemimpin menjadi dua, Pertama dengan cara pemilihan langsung, seperti pada proses terpilihnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan kedua dengan cara tidak langsung atau dengan perwakilan, seperti pada proses terpilihnya Umar bin Khatab dan Usman bin Affan. Sementara keabsahan dengan cara *bai'at*. Karena *bai'at* adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian dengan Allah SWT.

Hal ini senada dengan pendapat Al-Mawardi, bahwa jabatan seorang khalifah dapat terisi oleh dua jalan, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulbhaniyah* diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta : *Darul Falah* Fadli Basri, 2006), 5.

- a. Dengan pemilihan “*ahlul hilli wal ‘aqdi*” (orang cerdik pandai yang ditetapkan)
- b. Dengan janji penyerahan dari imam sebelumnya (sistem *waliyatul ‘ahdi* atau keputeramahkotaan)

Namun ada beberapa ulama yang berbeda dalam membagi cara pengangkatan pemimpin dalam Islam, pengangkatan menurut mereka di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Pemilihan oleh orang yang berhak memilih
- b. Penyerahan oleh Khalifah terdahulu kepada putranya atau seseorang familinya yang lain yang lazim disebut: *waliyatul ‘ahdi* ( Putera mahkota )
- c. Perebutan jabatan Khalifah oleh seorang dengan kekerasan

## 5. Tujuan Pemilihan Dalam Islam

Seperti telah dijelaskan di atas masalah Pemilu dalam Islam serta dasar pemilu, agar supaya kita mengetahui tujuan pemilu dalam Islam, maka kita akan membahas tentang masalah ini. Di dalam suatu negara Islam, diadakan pemilihan/ pengangkatan Kepala Negara sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tidak ada seseorang yang berhak untuk mengangkat diri dengan paksaan atau kekerasan sebagai Amir mereka.

Oleh sebab itu diadakan pemilihan karena Islam melarang mengangkat diri sebagai Khalifah (pemimpin), kecuali dengan persetujuan umat (ahli syura) dan tidak boleh memaksa seorang untuk



menjadi amir. Tujuan Pemilu dalam Islam, adalah, memberikan imam dukungan Rakyat, mereka yang dapat memperoleh dukungan terbut bagi dirinya dan memenuhi syarat untuk membuat keputusan yang mengikat 'tanpa menghiraukan jumlah mereka.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulbhaniyah* diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta : *Darul Falah* Fadli Basri, 2006), 15.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku / Literatur

- Abdul Muin Salim. 2002, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1977, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, Qahirat: Dar al-Anshor.
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Muhammad Iqbal, 2007, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Anwar, Ahmadi Ahmad. 1975, *Prinsip-prinsip Metododologi Research*. Jakarta : Sumbangsi
- Bahtiar,Wardi. 1997. *Metode Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- H. A. Djazuli. 2007, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana.
- Hasby Ash Shaddieqy, 2000, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung : Mandar Maju
- Ibnu Taimiyyah, 1996, *al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat*, Beirut: dar Al-Kutub al-Arabiyat.
- Imam Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulbhaniyah* diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Darul Falah Fadli Basri.
- Indonesia. 2014. *Undang-undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*. Bandung : Fokus Media
- J. Pulungan Suyuti. 2012, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali.
- Kartapradja, Koswara. 2002. *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi Dan Kemendirian Rakyat*. Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda.

- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- M. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Monografi. 2011. *Desa kota dalam Tahun 2011*
- Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara, “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta : Universitas Indonesia, 2000), h. 75.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1993. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah al-Zuhayli, 1995, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*, Jakarta: Gema Insani.

## **B. Sumber Wawancara**

- Akbar, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.
- Alfian, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.
- Ali, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.
- Amin, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.
- Anas, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.
- Asli Jauhari, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 28 Desember 2019.
- Doni, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Halim, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Hasan, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Hendro, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Herman, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 28 Desember 2019.

Ijal, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Ilham, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Jamal, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Jamaludin, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Junaidi, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Karyo, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Kohar, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Lutfi, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

M. Jafar, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Mahfud, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Siti, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Sudarmono, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Yunus, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Zainuddin, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

Zulfikar, wawancara dengan penulis, Desa Kota Dalam, Lampung Selatan, 20 Desember 2019.

### **C. Sumber Online**

Politik Hukum Islam di Indonesia <https://www.slideshare.net/aditurki/politik-hukumislamdiindonesia>